

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis implemetasi program *Destination Management Organization* (DMO) sebagai strategi pengelolaan destinasi wisata dapat diketahui berjalan cukup baik, program DMO menjadi trobosan baru dalam sistem pengelolaan destinasi wisata. Program DMO berbentuk sistem tata kelola destinasi wisata, dan organisasi tata kelola destinasi wisata. Organisasi tata kelola (DMO) hanya mengelola Taman Wisata Candi Borobudur secara *external*, maksudnya adalah pengelolaannya terfokus pada koordinasi, kolaboratif, partisipasi, sinkronisasi, dan pengendalian organisasi destinasi yang melibatkan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, pemerintah, serta akademisi.
 - a. Keberhasilan proses implementasi program DMO di Taman Wisata Candi Borobudur sangat bergantung pada *stakeholder*. Partisipasi secara aktif oleh *stakeholder* dalam mengelola Taman Wisata Candi Borobudur diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan DMO Borobudur.

- b. Struktur organisasi DMO yang jelas serta beranggotakan dengan jumlah yang minim, sangat memudahkan dalam pembagian tugas dan peran dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur.
 - c. hubungan kolaborasi antar *stakeholder* memudahkan DMO dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur.
 - d. Upaya sosialisasi dilakukan telah memberikan pemahaman kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan program DMO, sosialisasi yang baik akan mempengaruhi kinerja yang baik pula.
 - e. Manfaat dari program DMO yaitu, terjalinnya komunikasi antar *stakeholder*, meningkatkan kualitas pelayanan, menguatkan promosi kawasan Candi Borobudur, dan meningkatkan kunjungan wisata.
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program *Destination Management Organization* (DMO) sebagai strategi pengelolaan destinasi wisata dapat diketahui sebagai berikut:
- a. Faktor pendukung implementasi DMO pada Taman Wisata Candi Borobudur yaitu, daya tarik wisata alam dan budaya yang memang menjadi magnet utama dalam pariwisata. Pendampingan dari akademisi membantu DMO dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi tata kelola destinasi. Sarana dan prasarana yang tersedia memudahkan wisatawan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan berkontribusi merupakan bentuk dukungan terhadap program DMO.

- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi DMO pada Taman Wisata Candi Borobudur yaitu: masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan adanya pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian. Anggaran yang tidak sesuai membuat program kerja dari DMO Borobudur terhambat. Pemerintah yang kurang konsisten dan cenderung berubah-ubah dalam memutuskan kebijakan mengakibatkan terhambatnya program terimplementasi.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka organisasi tata kelola destinasi (DMO) disarankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan kesadaran masyarakat dan ikut berkontribusi terhadap Kawasan Candi Borobudur dengan cara merangkul dan pendekatan secara intensif kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi *stakeholder* yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin setiap bulan.
3. Sosialisasi harus lebih merata keseluruhan lapisan masyarakat kawasan Borobudur dengan mengikutsertakan Kelompok Kerja Masyarakat Borobudur dalam sosialisasi.
4. Anggaran yang dialokasikan kepada pihak DMO Borobudur harus sesuai dengan ketetapan awal oleh Pemerintah Pusat, agar anggaran tersebut dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan, sarana dan prasarana.

5. Pelaku industri pariwisata perlu menambahkan paket-paket wisata selain Candi Borobudur. Seperti paket kunjungan desa wisata, dan paket wisata alam lainnya yang terdapat di kawasan Borobudur, ini diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan.
6. Pemerintah Pusat harus lebih konsisten dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak ada tumpang tindih kepentingan di destinasi wisata.